

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai pusat pertumbuhan urban yang pesat, Kota Makassar menghadapi tantangan serius berupa banjir perkotaan yang semakin diperburuk oleh perubahan iklim, laju urbanisasi yang tinggi, serta infrastruktur yang telah usang. Kerentanan kota terhadap banjir dipertinggi oleh lokasi geografis dan topografi dataran rendah sehingga penting untuk mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi banjir yang efektif. Banjir yang berulang mengganggu kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan publik, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan proaktif terhadap pengelolaan banjir. Salah satu aspek penting dalam penanganan banjir ialah kapasitas organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. DPU memiliki peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem drainase kota. Kapasitas organisasi yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang mencukupi, teknologi yang tepat, dan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait, sangat penting untuk memastikan sistem drainase berfungsi optimal dalam mengurangi risiko banjir. Namun, dalam praktiknya DPU kota Makassar mungkin menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan kapasitas organisasinya. Keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang efektif antar instansi pemerintah, serta partisipasi masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor penghambat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 menetapkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk mewujudkan sistem drainase yang memenuhi permukiman yang sehat dan bebas genangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem drainase yang dapat berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah ingin mendorong kota-kota di Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan seperti curah hujan yang ekstrem dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Banjir merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di daerah perkotaan, terutama saat musim hujan tiba. Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Drainase adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan air limbah agar tidak menggenangi jalanan atau permukiman warga. Ketika sistem drainase dirancang dengan baik dan dirawat secara rutin, air yang turun dari hujan bisa langsung dialirkan ke sungai atau tempat pembuangan akhir. Dengan begitu, genangan air dapat dicegah dan risiko banjir bisa diminimalisir. Namun jika drainase tersumbat oleh sampah atau tidak cukup besar untuk menampung air, maka banjir bisa dengan mudah terjadi. Di kota-kota besar seperti Makassar, perkembangan kota dan peningkatan jumlah penduduk membuat tantangan dalam pengelolaan air semakin besar. Banyaknya bangunan dan minimnya lahan resapan air membuat air hujan tidak bisa meresap ke tanah. Oleh karena itu, drainase menjadi sangat penting untuk menjaga agar air bisa dialirkan dengan cepat dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Permasalahan banjir dan genangan air yang muncul setiap musim hujan umumnya disebabkan oleh buruknya fungsi sistem drainase. Banyak saluran drainase yang tidak ditangani secara menyeluruh sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan turut memperparah kondisi ini. Saluran drainase kerap tersumbat oleh sampah rumah tangga maupun limbah industri, yang dibuang secara sembarangan ke dalam saluran air. Hal ini menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukaan jalan atau permukiman warga. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur drainase secara menyeluruh. Saluran-saluran yang sudah harus dibersihkan dari endapan lumpur dan sampah yang menyumbat aliran air. Di beberapa tempat, kapasitas saluran juga perlu ditingkatkan atau diganti dengan sistem yang lebih modern agar dapat menampung air dalam volume besar, terutama saat hujan deras. Selain pembangunan fisik, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting. Permasalahan banjir yang tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau fisik seperti saluran drainase yang tersumbat atau kapasitas sistem yang terbatas. Ia menekankan

bahwa kerentanan institusional justru menjadi akar dari berbagai persoalan dalam penanggulangan risiko bencana, termasuk banjir (Lassa, J.A. 2010).

Dengan meningkatkan kapasitas organisasi, Indonesia dapat lebih baik mengatasi tantangan-tantangan kompleks seperti pembangunan ekonomi, mitigasi bencana, perlindungan lingkungan, dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yang dimana seluruh daerah di Indonesia menyangkut desentralisasi wewenang yang dimana seluruh daerah dapat melaksanakan segala urusan pemerintah secara mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat sehingga diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai bentuk kapasitas yang dimiliki sebuah organisasi yang dapat menunjang segala bentuk pelaksanaan urusan pemerintah tersebut.

Pada tahun 2013, Makassar mengalami banjir yang cukup signifikan. Genangan air yang melanda di beberapa wilayah kota ini akibat sistem drainase yang belum memadai. Banjir tersebut menyebabkan dampak serius terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah memulai proyek pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan. Berbagai lokasi strategis di kota ini menjadi fokus utama menjadi upaya untuk meminimalkan risiko banjir dan genangan air yang seringkali terjadi pada saat musim hujan. Beberapa lokasi yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan termasuk daerah pusat kota. Dengan adanya proyek ini DPU dapat menangani pembersihan dan perbaikan saluran air, pembangunan saluran baru, dan peningkatan kapasitas sistem drainase.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terus menerus berupaya meningkatkan kualitas sistem drainase untuk mengatasi permasalahan genangan dan banjir yang kerap terjadi, khususnya pada musim hujan. Salah satu penyebab utama terjadinya genangan adalah sumbatan pada saluran air akibat sampah yang dibuang sembarangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa tumpukan sampah di beberapa titik saluran air. Untuk itu, sepanjang tahun 2023, DPU telah melakukan penanganan pada sejumlah lokasi genangan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Titik Lokasi Genangan Yang Ditangani Tahun 2023

No.	LOKASI	ZONA	LUAS GENANGAN (HA)
1.	Jl. Rappocini Raya	1	15,43
2.	Saluran Besar Banta Bantaeng	1	46,17
3.	Jl. Andi Jema	1	10,38
4.	Jl. Sultan Alauddin	1	121,88
5.	Saluran Besar Bontoduri	1	51,02
6.	Jl. Malengkeri Raya dan Jl. Dg Tata Raya	1	72,27
7.	Kanal Dg. Tata 3	1	37,01
8.	Kanal Hartaco Indah	1	12,23
9.	Jl. Manunggal 31	1	48,68

Sumber Data : Bidang PSDA dan Drainase, (2023)

Lokasi ini termasuk dalam zona yang memiliki kepadatan aktivitas dan pembangunan cukup tinggi, sehingga memperbesar risiko terjadinya genangan. Namun demikian, faktor penyebab utama dari genangan bukan semata-mata pada kapasitas saluran yang dianggap tidak mampu menampung debit air, melainkan juga karena adanya sumbatan pada saluran akibat tumpukan sampah. Pemeriksaan di lapangan menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya saluran air tidak berfungsi maksimal sebagaimana mestinya. Selain itu, pertumbuhan kota yang sangat cepat dan curah hujan yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim menambah kompleksitas permasalahannya.

Banyak daerah yang dulunya merupakan area resapan air kini telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman atau komersial, sementara infrastruktur drainasenya belum sepenuhnya diperbarui. Dinas Pekerjaan Umum sendiri terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi persoalan ini. Pembersihan saluran dilakukan secara berkala, rehabilitasi sistem drainase terus berjalan, dan langkah-langkah peningkatan kapasitas saluran pun telah dirancang dan diimplementasikan di sejumlah titik prioritas. Upaya penyadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan juga terus dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan saluran air. Dengan melihat berbagai faktor tersebut, maka menjadi jelas bahwa masalah genangan tidak bisa hanya dibebankan pada instansi teknis semata. Ini merupakan persoalan bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika upaya teknis yang dilakukan DPU diimbangi dengan partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan, maka sistem drainase akan semakin mampu menampung debit air, dan permasalahan genangan pun dapat diminimalisir secara berkelanjutan. Seperti yang dapat kita lihat pada fenomena yang terjadi di Wilayah Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Dimana sistem jaringan drainase di Kelurahan karunrung semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air yang terjadi sehingga Kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Apabila kapasitas sistem drainase menurun yang diakibatkan oleh beberapa faktor maka debit yang normal sekalipun tidak dapat ditampung oleh sistem drainase yang ada. Adapun penyebab menurunnya kapasitas sistem antara lain: Terjadinya endapan, kerusakan fisik sistem jaringan, dan adanya bangunan lain di atas sistem jaringan. Pada saat musim hujan sering terjadi peningkatan debit aliran yang diakibatkan oleh berbagai faktor sehingga mengakibatkan banjir.

Tabel 1.2 Data Drainase Kota Makassar Tahun (2020)

No.	URAIAN	JUMLAH / VOLUME	KETERANGAN
1.	Total saluran drainase yang teridentifikasi bermasalah	27 Saluran	Data DPU Makassar, perlu perbaikan & pemeliharaan
2.	Panjang drainase yang dibersihkan selama setahun 2020	162.450 Meter	Tersebar di beberapa kecamatan
3.	Volume sedimen yang dikeruk selama tahun 2020	50.048 m ³	Mengurangi potensi banjir & genangan
4.	Contoh hasil pengerukan per satu rayon (maret 2020)	1.755 Meter (panjang) / 824 m ³ (sedimen)	Salah satu titik kegiatan pemeliharaan drainase

Sumber Data : Bidang SDA dan Drainase, (2020)

Data di atas bersifat sebagian dan berasal dari laporan DPU Makassar tahun 2020. Angka "27 saluran bermasalah" adalah jumlah yang teridentifikasi secara prioritas untuk diperbaiki, bukan keseluruhan jaringan drainase kota. Jumlah total saluran drainase di Kota Makassar diperkirakan lebih besar, mencakup drainase, sekunder, dan tersier yang terbesar dari berbagai kecamatan. Data tersebut menunjukkan jumlah saluran drainase yang teridentifikasi bermasalah dan menjadi prioritas perbaikan, panjang saluran yang dibersihkan, serta volume sedimen yang berhasil dikeruk selama satu tahun. Selain itu, tabel juga menampilkan contoh hasil pengerukan pada salah satu rayon yang dilakukan pada bulan maret 2020. Informasi ini bersifat sebagian dan tidak mewakili keseluruhan jaringan drainase di kota, karena fokus pada titik-titik yang menjadi prioritas penanganan.

Sementara itu, estimasi kondisi jaringan drainase Kota Makassar berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021, yang Mencakup kondisi drainase yang baik maupun rusak

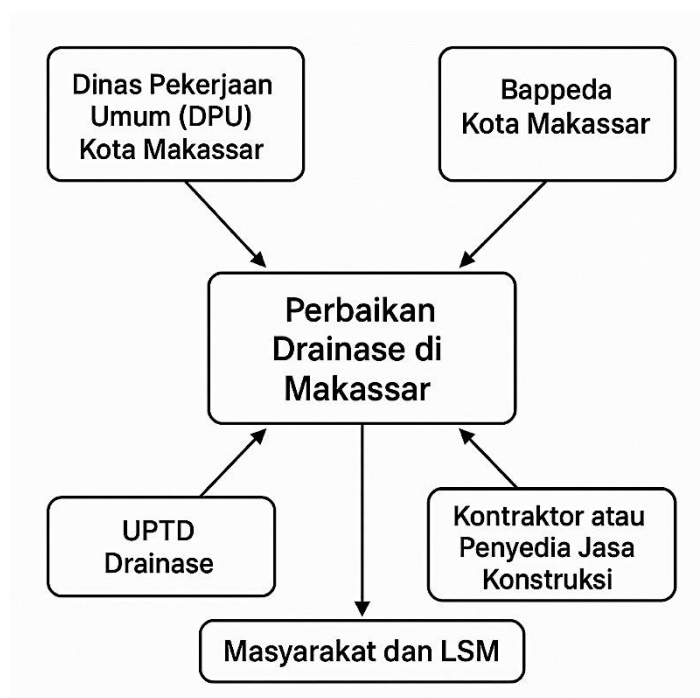
Tabel 1.3 Kondisi Drainase Kota Makassar – Tahun 2023

Kategori Kondisi Drainase	Volume (m ³ atau unit)	Presentase (%)	Keterangan
Berfungsi (Baik)	2.471.226,16	76,43%	Drainase yang masih optimal dan berfungsi dengan baik
Rusak / Rusak Sedang	762. 197,84	23,57%	Drainase perlu rehabilitasi dan renovasi
Total Aset Drainase	3.233.424,00	100%	Total aset drainase yang diinventarisasi dalam laporan

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, 2021

Tabel tersebut menyajikan estimasi kondisi jaringan drainase di Kota Makassar tahun 2023 yang diambil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021. Data ini menggambarkan proporsi antara drainase yang masih berfungsi dengan baik dan yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan tabel, sebagian besar drainase (76,43% dengan volume 2.471.226,16 m³ atau unit) masih optimal dan dapat berfungsi dengan baik. Sementara itu, 23,57% atau setara 762.197,84 m³/unit masuk kategori rusak atau rusak sedang, sehingga memerlukan rehabilitasi dan renovasi. Total aset drainase yang diinventarisasi mencapai 3.233.424,00 m³/unit, mencakup seluruh jaringan yang tercatat dalam laporan tersebut.

Gambar 1.1 Diagram Stakeholder Perbaikan Drainase Di Kota Makassar

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Sebagai instansi teknis utama yang bertanggung jawab langsung atas pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem drainase.

Peran DPU meliputi:

- Menyusun rencana teknis perbaikan dan pembangunan drainase.
- Menentukan prioritas lokasi drainase yang akan diperbaiki.
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Melakukan evaluasi dan pemeliharaan rutin agar saluran tetap berfungsi.

Bidang Drainase – DPU Kota Makassar Bidang ini adalah unit khusus yang menangani seluruh program drainase, termasuk:

- Seksi Perencanaan Drainase: membuat desain teknis, studi kelayakan, dan perhitungan kapasitas.
- Seksi Pemeliharaan Drainase: mengatur kegiatan pengerukan sedimen, perbaikan saluran rusak, dan pembersihan rutin.
- Seksi Pengawasan: memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar teknis.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Drainase

- Unit pelaksana di tingkat lapangan yang bertugas langsung melakukan pengerukan, pembersihan sampah dan lumpur, serta perbaikan ringan di saluran drainase.
- Biasanya terbagi per rayon/kecamatan untuk mempercepat respon penanganan.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Makassar

- Berperan dalam menyelaraskan program perbaikan drainase dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan (misalnya dalam RTRW dan RPJMD).
- Menyusun prioritas pendanaan dan kebijakan yang mendukung program drainase.

Kontraktor atau Penyedia Jasa Konstruksi

- Terlibat ketika proyek perbaikan drainase skalanya besar atau sifatnya pembangunan baru.
- Bekerja berdasarkan dokumen kontrak yang disusun DPU.

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Turut serta dalam pengawasan, pelaporan saluran tersumbat, serta gotong royong membersihkan drainase di lingkungan masing-masing.
- Beberapa LSM juga aktif mendorong edukasi kepedulian lingkungan dan pentingnya menjaga drainase.

Dengan adanya suatu sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan perkotaan yang bersangkutan. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang menetapkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dalam konteks penanganan banjir dan pengelolaan drainase, peraturan ini sangat penting karena memberikan dasar operasional bagi DPU sebagai instansi teknis yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan infrastruktur air dan drainase. Melalui peraturan ini, DPU tidak hanya diakui peran strategisnya tetapi juga diberikan kewenangan serta tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan serta pemeliharaan sistem drainase diseluruh wilayah kota makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015: Peraturan ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mengatur arah pengembangan wilayah kota makassar. Meski peraturan ini tidak secara eksplisit membahas sistem drainase atau penanganan banjir, ia tetap memberikan kerangka kerja yang penting bagi pengembangan infrastruktur kota secara umum, termasuk drainase. Dalam konteks penanganan banjir RT/RW berperan sebagai acuan utama dalam menentukan zonasi, peruntukan lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan sistem aliran air dan resapan. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat adalah sebuah regulasi yang bertujuan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga kota. Meskipun fokus utamanya adalah pada aspek sosial ketertiban keamanan, peraturan ini secara tidak langsung memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan sistem drainase dan penanganan banjir.

Selain itu, kapasitas organisasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan, banyak kasus dimana saluran drainase di bangun dengan baik namun karena tidak ada sistem pemeliharaan rutin dan terjadwal, akhirnya Kembali tersumbat oleh sedimen dan sampah. Kapasitas organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk secara konsisten menghasilkan hasil yang berkualitas, merespons perubahan, dan memelihara keberlanjutan jangka panjang (Horton et al.2003) sederhana kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Beberapa penelitian terlebih dahulu terkait kapasitas organisasi, diantaranya Desy Saptari, Elisa Susanti, Yogi Suprayogi (2021) mengkaji tentang kapasitas organisasi dinas pariwisata pemuda dan olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan kabupaten tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini, Dinas pariwisata pemuda dan olahraga di tuntut untuk memiliki kelengkapan organisasi guna mencapai tujuannya dalam mengembangkan pariwisata unggulan kabupaten tasikmalaya. kapasitas yang dimiliki belum memadai, utamanya pada kapasitas anggota staff dan infrastruktur, teknologi dan keuangan. Belum memadainya dua kapasitas tersebut, berdampak pada kondisi kapasitas manajemen program dan proses serta kapasitas jaringan/hubungan dengan organisasi lain. Sedangkan, untuk kapasitas kepemimpinan startegis sudah memadai namun itu pun masih perlu peningkatan pada aspek-aspek kepemimpinan di dalamnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah lokasi penelitian, teori yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus terhadap tantangan dalam SDM dan infrastruktur yang memengaruhi manajemen program sedangkan penelitian sekarang terfokus pada aspek teknis dan koordinasi antar instansi dalam proyek infrastruktur . Kedua dinas memerlukan peningkatan kapasitas, tetapi dengan fokus yang berbeda sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Mohammad Iqbal, Ryta Mirna, Elisa Susanti (2022) mengkaji tentang kapasitas organisasi dinas pertanian tanaman pangan dan hortukultura proinsi jabar dalam pengembangan benih padi induk. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kapasitas organisasi akan lebih baik apabila aspek staff member (SDM) terpenuhi baik itu perekrutan, jumlah maupun keahlian pegawai. Infastruktur terpenuhi dari segi jumlah bangunan dan alat. Teknologi yang digunakan mampu menghasilkan peningkatan jumlah benih padi bermutu. Kapasitas keuangan sesuai dengan kebutuhan, dan terakhir terjalin hubungan dan jaringan diantar stakeholder yang kuat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah teori yang digunakan, lokasi penelitian dan pihak yang dilibatkan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada peningkatan kualitas benih dengan dukungan SDM ahli, teknologi pertanian serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam ekosistem pertanian. Sementara penelitian sekarang lebih fokus terhadap infrastruktur, anggaran pembangunan fisik, dan koordinasi dengan kontraktor serta pemerintah daerah.

Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami (2018) mengkaji tentang kapasitas organisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di indonesia *organizational capacity in improving the quality of education madrasah in Indonesia*. Dari hasil penelitian ini dilapangan kapasitas kemeterian agama kabupaten bandung dalam meningkatkan mutu atau kualitas Pendidikan madrasah ibtidaiyah di kabupaten bandung masih rendah, hal ini mengacu organisasi dikatakan baik apabila aspek-aspek dalam kapasitas organisasi itu terpenuhi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah lokasi penelitian, teori yang digunakan dan pihak yang dilibatkan. Penelitian terdahulu fokus pada kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang sering menjadi penghambat utama sedangkan penelitian sekarang cenderung memiliki standar operasional yang lebih berstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam upaya perbaikan drainase sebagai bagian integrasi dari penanganan banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan. Dengan pendekatan komprehensif, peneliti ini berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kapasitas organisasi DPU baik dari sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran, maupun dari eksternal, seperti kebijakan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan tekanan akibat perubahan iklim. Dari uraian permasalahan yang di bahas maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kapasitas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pada Perbaikan Drainase Dalam Penanganan Banjir Di Kota Makassar".

1.2 Landasan Teori

Kapasitas organisasi, pemerintah sangat dipengaruhi oleh 3 elemen utama, yaitu struktur lembaga, sumber daya manusia, dan proses kerja yang ada di dalamnya. Ia menekankan bahwa organisasi pemerintah yang kuat bukan hanya dilihat dari keberadaan struktur formal, tetapi dari kemampuan lembaga tersebut untuk mengelola program secara efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Grindle, 1997). Dari pengertian itu kapasitas organisasi tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan struktur kelembagaan yang formal, tetapi harus dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mengelola program secara efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Tiga elemen utama yang menjadi penentu kapasitas tersebut adalah struktur kelembagaan yang jelas dan fungsional,

sumber daya manusia yang berkualitas, serta proses kerja yang terorganisasi pemerintah akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Pada dasarnya terdapat berbagai teori kapasitas organisasi, Misalnya teori yang di kemukakan oleh (Grant R.M 1996) dalam teori ini grant menekankan bahwa kapasitas organisasi berhubungan erat dengan sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki oleh organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Menurut Grant, kapasitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya fisik dan finansial yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara efektif. Kapasitas ini mencakup keterampilan, pengetahuan dan proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi untuk menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lain dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang ada.

UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 2009 memberikan pendekatan yang holistik dan terstruktur dalam memahami bagaimana organisasi dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya secara berkelanjutan. Dalam pandangan UNDP, kapasitas organisasi tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis semata, melainkan mencakup keseluruhan kemampuan yang dimiliki individu dalam organisasi itu sendiri, dan juga lingkungan eksternal atau sistem kelembagaan yang lebih luas. UNDP menjelaskan bahwa kapasitas organisasi terbentuk melalui interaksi antara tiga tingkatan: kapasitas individu mencerminkan sejauh mana pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan motivasi yang dimiliki oleh setiap orang dalam organisasi mencakup struktur kelembagaan, proses kerja, budaya organisasi, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang efektif.

Secara umum, teori kapasitas organisasi mengacu pada pemahaman tentang sejauh mana sebuah organisasi mampu menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan peranannya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas organisasi bukan hanya tentang ketersediaan sumber daya, tetapi lebih kepada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara strategis.

Hall, (2003) Menekankan bahwa kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan institusi dalam memenuhi mandate dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam pandangan nya, kapasitas organisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada bagaimana organisasi tersebut mengorganisasi memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara optimal.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang di kemukakan oleh (Hall, 2003)

- Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Kapasitas Keuangan
- Kapasitas Jaringan dan Relasi
- Kapasitas Proses dan Infrastruktur
- Kapasitas perencanaan dan pengembangan

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perbaikan drainase untuk penanganan banjir. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas DPU, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pengelolaan drainase dan penanganan banjir yang lebih efektif di kota makassar. Adapun teori ini dibagi dalam lima indikator yaitu:

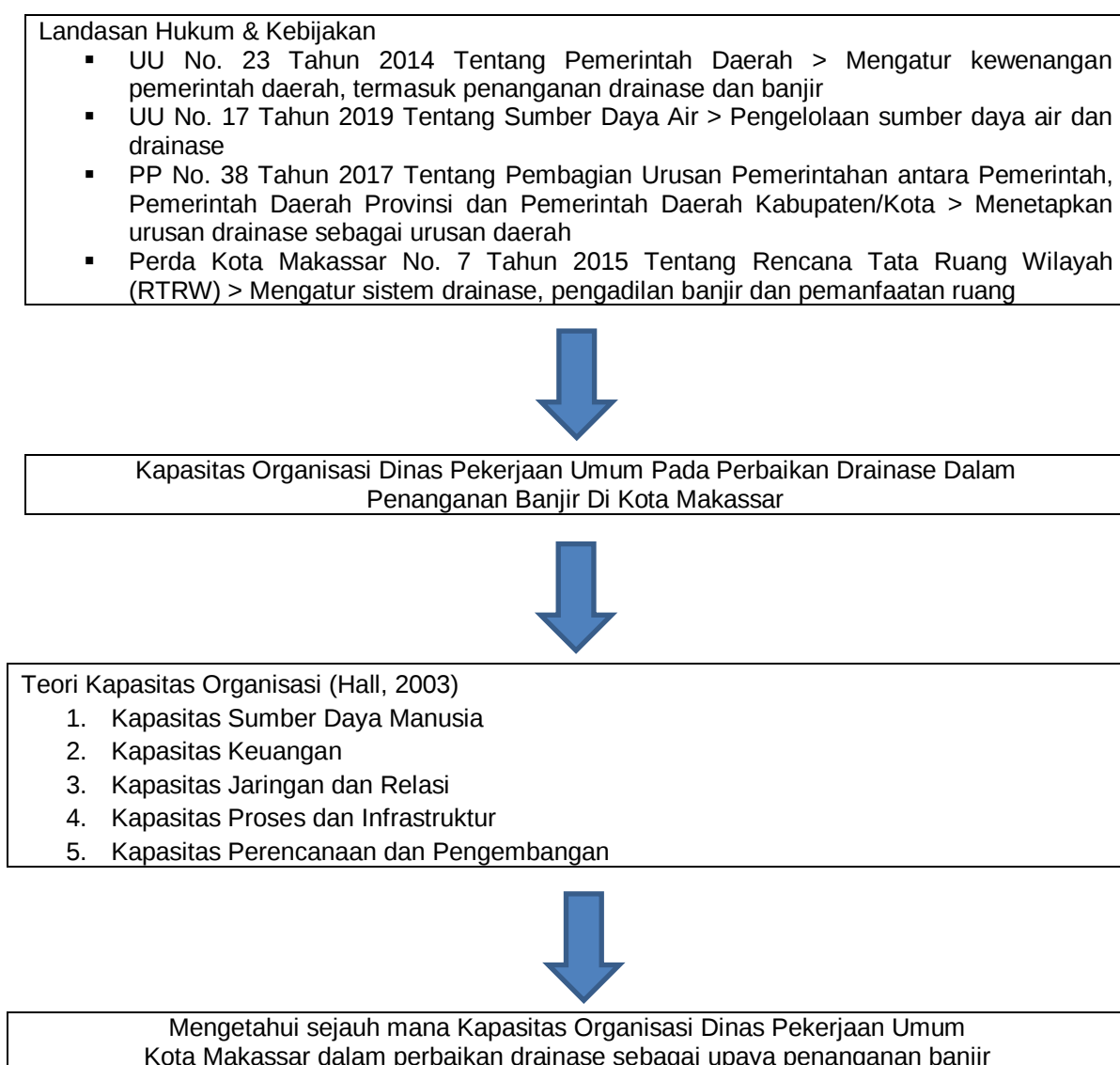
- Pertama, Kapasitas sumber daya manusia dalam perbaikan drainase untuk penanganan banjir ini mencakup berbagai aspek keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan sistem drainase berfungsi dengan efektif dan mampu menghadapi tantangan, khususnya ancaman banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan urbanisasi. Salah satu aspek keahlian dan keterampilan terpenting ialah pengetahuan teknis mereka mampu menganalisis pola curah hujan, memahami perilaku aliran air di wilayah perkotaan, serta

mengantisipasi potensi limpasan yang menyebabkan banjir. Selain itu, keterampilan dalam perencanaan, desain, dan konstruksi infrastruktur drainase juga sangat diperlukan. Pada tahap desain, sumber daya manusia juga harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek, seperti kapasitas saluran, topografi, pengguna lahan, serta keberlanjutan lingkungan. Pada tahap konstruksi, diperlukan ketelitian dalam menerapkan desain ke lapangan, memastikan kualitas material, serta mengelola proses pembangunan agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

- Kedua, Kapasitas keuangan dalam pengelolaan sistem drainase mencerminkan suatu instansi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum atau satuan kerja yang terkait, dalam mengelola dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kapasitas ini menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur drainase dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Kemampuan ini mencakup pengelolaan dana yang diterima dari berbagai sumber, baik dari anggaran pemerintah pusat, dana otonomi daerah, maupun sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti bantuan program dari kementerian atau hibah. Setiap jenis pendanaan tersebut memiliki mekanisme pengelolaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban yang berbeda, sehingga diperlukan keterampilan keuangan yang memadai untuk memastikan bahwa dana dapat diserapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan terhadap penggunaan dana juga menjadi bagian penting dari kapasitas keuangan, untuk memastikan tidak terjadi pemborosan, atau ketidaktepatan sasaran.
- Ketiga, Kapasitas jaringan dan relasi mencerminkan kemampuan instansi atau lembaga pengelola, seperti Dinas Pekerjaan Umum dalam membangun, menjaga dan memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama. Melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, instansi terkait dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan drainase, seperti menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan turut serta dalam kegiatan kerja bakti lingkungan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan drainase bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari seluruh masyarakat. Di era digital seperti saat ini, penguatan kapasitas jaringan dan relasi juga diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi mampu menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Salah satu contohnya adalah pengguna sistem informasi geografis (SIG) yang dapat digunakan melakukan pemetaan saluran drainase secara akurat. Dengan SIG, lokasi saluran, kondisi eksisting, serta titik-titik rawan banjir dapat di dokumentasikan dan dianalisis dengan lebih baik, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan teknis maupun perencanaan program kedepan.
- Keempat, Kapasitas proses dan infrastruktur dalam pengelolaan sistem drainase merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan sistem yang efektif, tanggap dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko banjir. Dalam aspek proses perencanaan, kapasitas ini tercermin dari kemampuan untuk Menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut mencakup langkah-langkah seperti pemetaan area rawan banjir, yaitu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap genangan air atau luapan sungai akibat curah hujan ekstrem. Selain itu diperlukan indentifikasi titik-titik genangan secara detail, baik berdasarkan data historis, laporan masyarakat, maupun hasil survei lapangan untuk mengetahui lokasi kritis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan drainase. Tujuan utama dari perencanaan ini ialah untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan, meningkatkan ketahanan infrastruktur, serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kapasitas proses dan infrastruktur yang kuat menciptakan pondasi bagi sistem drainase kota yang tidak hanya reaktif terhadap permasalahan banjir yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam melakukan pencegahan dan pengelolaan risiko secara terencana. Upaya memperkuat kapasitas ini menjadi Langkah strategis dalam mewujudkan kota yang lebih tangguh, aman dan berkelanjutan.

- Kelima, Kapasitas perencanaan dan pengembangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menjadi salah satu aspek penting dalam upaya membangun sistem drainase kota yang tangguh, modern dan berkelanjutan. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan instansi dalam merancang visi jangka yang komprehensif, serta mengelola setiap tahapan pengembangan dengan strategi yang teukur dan tanggung jawab. Dalam hal perencanaan, DPU menunjukkan kemampuannya untuk merumuskan rencana strategis jangka panjang yang terfokus pada pengembangan sistem drainase. Rencana strategis ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, perkembangan tata kota, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Penyusunan rencana ini mencakup penetapan prioritas proyek berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan mendesak, penentuan tujuan jangka panjang yang jelas, serta perumusan strategis implementasi yang realistis dan bertahap. Melalui penetapan prioritas, Dinas mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi cepat, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efektif. Sedangkan penentuan tujuan jangka panjang, seperti target pengurangan kawasan rawan banjir atau peningkatan kapasitas saluran utama, menjadi pedoman arah bagi seluruh kegiatan pengelolaan drainase.

Gambar 1.2 Kerangka Pikir



I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Kapasitas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pada Perbaikan Drainase Dalam Penanganan Banjir Di Kota Makassar?

I.4 Tujuan Penelitian

Dilandasi rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis Kapasitas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pada Perbaikan Drainase Dalam Penanganan Banjir Di Kota Makassar

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

1. Manfaat Teoritis (Akademik)

Peneliti ini merupakan sarana pengimplementasian teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sekaligus memperkaya kajian dalam studi administrasi publik khususnya mengenai Dinas Pekerjaan Umum Pada Perbaikan Drainase dalam Penanganan Banjir. Dengan begitu, peneliti ini di harapkan dapat menjadi referensi lanjutan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan manfaat dan masukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Pada Perbaikan Drainase Dalam Penanganan Banjir Di Kota Makassar.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan individu atau kelompok. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data.

II.2 Desain Penelitian

Creswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Strategi ini menekankan pada desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, dari satu atau lebih individu.

Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Kemudian, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk narasi atau gambar dengan tujuan untuk penelusuran dengan menggunakan teori yang bisa mengembangkan pemahaman mengenai kasus yang di alami. Alasan peneliti ini menggunakan pendekatan studi kasus ialah dianggap dapat menjadi parameter untuk memberikan gambaran secara detail terkait suatu peristiwa atau fenomena.

II.3 Prosedur

a. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA)
2. Staff SDA
3. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Satgas Drainase
4. Masyarakat

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sekumpulan cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan informasi atau data yang diperlukan. Creswell (2018) menyebutkan tiga Teknik utama dalam pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah salah satu langkah yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran sikap/Tindakan, perkataan/pembicaraan, interaksi dan kondisi lingkungan yang ada.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Hal ini dilakukan guna memperoleh data yang bersifat deskriptif, persepsi, pendapat dan perasaan, keyakinan dan pengalaman dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dapat berupa memorabilia, korespondensi, dan audiovisual. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan menelaah dokumen dokumen yang diperoleh. Teknik ini digunakan sebagai pendukung wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga hasil penelitian bersifat argumentasi dan kredibel.

c. Teknik Analisis Data

Creswell (2018) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami data teks dan gambar. Sehingga dalam prosesnya melibatkan segmentasi dan pemisahan data kemudian menyatukannya kembali. Lebih lanjut, Creswell (2018) menjelaskan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)

Tahapan awal dalam analisis data yaitu mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optic bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual. Selanjutnya menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)

Langkah ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Hal ini seperti apa gagasan umum yang disampaikan informan, apa idenya, hingga apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.

3. Mengkode Data (*Coding the Data*)

Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan memberi tanda atau kode. Selanjutnya menulis catatan-catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (kalimat atau gambar) yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama atau label pada kategori tersebut. Pemberian nama atau label tersebut seringkali didasarkan pada Bahasa asli atau ucapan sebenarnya dari informan.

4. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)

Tahapan ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Selain itu, penggunaan kode juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

5. Menginterpretasi Makna Tema/Deskripsi (*Interpreting the Meaning of Themes/Descriptions*)

Tahapan ini merupakan yang terakhir dalam Teknik analisis data. Deskripsi dan tema yang ada kemudian direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis.

II.4 Validitas dan Realibilitas Data

Gibs dalam Creswell (2018:361), berpendapat bahwa validitas kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu, sedangkan realibitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten pada penelitian yang berbeda dan proyek yang berbeda.

- Mendefinisikan validitas kualitatif

Creswell & Miller dalam Creswell (2018:361) berpendapat bahwa validitas adalah salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Banyak istilah dalam literatur kualitatif yang membahas validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas.

- Menggunakan beberapa prosedur validitas

Perspektif prosedural yang direkomendasikan untuk proposal penelitian adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan satu atau lebih strategi yang tersedia untuk memeriksa keakuratan temuan. Peneliti harus secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal mereka.

- Menggunakan keandalan kualitatif

Yin dalam Creswell (2018:363) menyarankan agar peneliti kualitatif perlu mendokumentasikan prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin Langkah dalam prosedur tersebut. Beliau juga merekomendasikan untuk menyiapkan protocol dan database studi kasus yang terperinci, sehingga orang lain dapat mengikuti prosedurnya.

- Generalisasi kualitatif

Menurut Gibs dalam Creswell (2018:363), generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif, karena maksud dari bentuk penyelidikan ini bukanlah untuk menggeneralisasi temuan pada individu, lokasi, atau tempat di luar yang diteliti.